

Pendampingan Participatory School Governance untuk Memperkuat Tata Kelola Sekolah Berbasis Partisipasi Komunitas Menuju Sekolah Berkelanjutan

Lalu Muktar^{1*}

^{1*}Universitas Islam Negeri Mataram

e-mail: lalumuktar@uin.ac.id

*Penulis Korespondensi

DOI: [10.63982/dharmabakti.7t02w637](https://doi.org/10.63982/dharmabakti.7t02w637)

ABSTRACT

Penguatan tata kelola sekolah yang partisipatif merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan dan mewujudkan sekolah yang berkelanjutan. Namun, implementasi tata kelola di sekolah mitra masih menghadapi kendala berupa rendahnya keterlibatan pemangku kepentingan, terbatasnya kapasitas manajerial, serta belum terbangunnya kemitraan yang sistematis antara sekolah, komite sekolah, orang tua, pemerintah desa, dan masyarakat. Program pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas tata kelola sekolah melalui pendampingan manajemen pendidikan berbasis partisipasi komunitas. Kegiatan dilaksanakan menggunakan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) yang dipadukan dengan model Participatory School Governance (PSG). Tahapan kegiatan meliputi analisis kebutuhan, penyusunan modul pendampingan, workshop penguatan tata kelola, pendampingan penyusunan dokumen, simulasi pengambilan keputusan partisipatif, serta monitoring dan evaluasi. Program melibatkan 25 peserta yang mewakili unsur strategis sekolah dan masyarakat. Hasil pengabdian menunjukkan tersusunnya dokumen tata kelola sekolah secara partisipatif, meliputi pembaruan Rencana Kerja Sekolah (RKS), penyusunan SOP tata kelola, mekanisme koordinasi dengan komite sekolah, serta sistem monitoring internal. Selain itu, terbentuk forum komunikasi antara sekolah dan pemangku kepentingan yang memperkuat kolaborasi, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program sekolah. Model pendampingan PSG yang diterapkan berpotensi menjadi praktik baik dalam penguatan tata kelola sekolah berbasis partisipasi komunitas untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan.

Keywords: Asset-Based Community Development; kemitraan sekolah; manajemen pendidikan; Participatory School Governance; tata kelola sekolah

Submit Artikel: 02/08/2026

Revisi Artikel: 28/08/2026

Artikel diterima: 30/08/2026

Pendahuluan

Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas proses pembelajaran, tetapi juga oleh tata kelola sekolah yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam paradigma manajemen pendidikan modern, sekolah dipandang sebagai organisasi pembelajar yang keberhasilannya bergantung pada kolaborasi antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, orang tua, pemerintah, dan masyarakat untuk membangun budaya mutu serta memastikan keberlanjutan program pengembangan sekolah (Gauvin & Blouin, 2022; Zerika et al., 2022). Tata kelola yang kolaboratif memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih inklusif, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan kapasitas sekolah dalam menghadapi perubahan serta tantangan pendidikan yang dinamis (Bowen et al., 2022; Labelle & St-Germain, 2021). Selain itu, pengalaman krisis pembelajaran menunjukkan bahwa tata kelola yang adaptif, didukung kemitraan komunitas dan kebijakan yang terintegrasi, menjadi prasyarat penting dalam menjaga kualitas layanan pendidikan dan mewujudkan sekolah yang berkelanjutan (Arapi et al., 2024; l'enfance & Mondiale, 2021).

Mitra pengabdian merupakan sekolah yang memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan, namun implementasi tata kelola partisipatif masih menghadapi berbagai kendala. Perencanaan program sekolah masih didominasi oleh manajemen internal sehingga keterlibatan komite sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program belum terintegrasi secara sistematis, padahal Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menekankan pentingnya otonomi yang disertai partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (Lestaringtyas, 2024; Suryana, 2023). Akibatnya, dokumen perencanaan strategis belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil sekolah maupun aspirasi masyarakat, sedangkan fungsi komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengawas, dan mediator juga belum dimanfaatkan secara optimal (B, 2024; Kartika et al., 2023; Mahyudin & Lestari, 2021; Tujiyono, 2023).

Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa sekolah belum memiliki mekanisme kolaboratif yang sistematis dalam penyusunan program kerja dan pengambilan keputusan sehingga penerapan tata kelola partisipatif belum berlangsung secara optimal. Implementasi MBS masih terkendala oleh terbatasnya kapasitas manajerial tim pengembang sekolah, lemahnya koordinasi antarunsur sekolah, serta belum terbentuknya budaya kolaborasi yang berkelanjutan (Handoyo et al., 2021; Komara et al., 2023; Rahmat & Wahyudin, 2021). Di sisi lain, keterlibatan masyarakat masih cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substantif dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program sekolah sehingga kontribusi komunitas terhadap peningkatan mutu pendidikan belum optimal (Syahmidi et al., 2023; Yanuardianto, 2021). Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya sense of ownership masyarakat terhadap program sekolah, melemahnya sinergi antarpemangku kepentingan, serta menurunnya efektivitas pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan (Rochaendi et al., 2022; Susilawathi et al., 2021).

Berbagai pelatihan manajemen sekolah yang telah diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga pendidikan selama ini umumnya masih berorientasi pada pemenuhan aspek administratif, seperti penyusunan dokumen akreditasi, pelaporan, dan administrasi sekolah, sehingga belum mampu membangun tata kelola kolaboratif berbasis partisipasi komunitas secara berkelanjutan. Padahal, berbagai kajian menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola lebih ditentukan oleh keterlibatan aktif

seluruh pemangku kepentingan melalui dialog, kepercayaan, komitmen bersama, dan pengambilan keputusan kolaboratif (Nurhayati & Rahman, 2023; Rohman & Hamidah, 2024). Pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, akademisi, komunitas, dunia usaha, dan media terbukti meningkatkan efektivitas implementasi program sekaligus memperkuat akuntabilitas dan keberlanjutan kebijakan (Christiani et al., 2022; Pujiyono, 2022). Oleh karena itu, sekolah masih memerlukan model pendampingan yang mampu mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan dalam satu sistem tata kelola yang berkelanjutan (Efendi et al., 2023; M et al., 2024; Natika, 2024).

Analisis situasi menunjukkan bahwa permasalahan mitra dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama. Pertama, pada aspek tata kelola, sekolah belum memiliki sistem yang mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program, padahal pendekatan partisipatif seperti Participatory Action Research (PAR) dan Participatory Rural Appraisal (PRA) terbukti mampu memperkuat kolaborasi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah (Aruna et al., 2024; Purnamasari et al., 2024; Rahman et al., 2024; Widyastuti et al., 2024). Kedua, pada aspek kapasitas manajerial, tim manajemen sekolah masih memerlukan penguatan kompetensi dalam perencanaan strategis, pengelolaan program berbasis data, kepemimpinan kolaboratif, serta pengembangan budaya mutu sekolah sebagai fondasi peningkatan kualitas layanan pendidikan (Hasanah, 2021; Iskandar et al., 2021; Rasidi et al., 2022; Sholeh, 2023). Ketiga, pada aspek kemitraan dan keberlanjutan, hubungan antara sekolah, komite sekolah, orang tua, pemerintah desa, dan masyarakat belum terbangun dalam sistem kolaborasi yang terstruktur sehingga keberlanjutan program sekolah masih bergantung pada inisiatif individu, padahal kemitraan formal lintas sektor terbukti mampu memperkuat efektivitas, dukungan sumber daya, dan keberlanjutan program pendidikan (Agustina, 2023; Ahmad Sultra Rustam & Erni Qomariyah, 2024; Azani et al., 2024; Ferianti et al., 2023; Missouri et al., 2022).

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, program pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas tata kelola sekolah melalui pendampingan manajemen pendidikan berbasis partisipasi komunitas untuk mewujudkan sistem pengelolaan sekolah yang efektif, kolaboratif, akuntabel, dan berkelanjutan. Solusi IPTEKS yang ditawarkan berupa model Participatory School Governance, yaitu pendekatan pendampingan yang mengintegrasikan pelatihan, lokakarya, coaching, pendampingan penyusunan dokumen tata kelola, simulasi pengambilan keputusan partisipatif, monitoring implementasi, serta evaluasi bersama yang melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua, pemerintah desa, dan masyarakat. Melalui model tersebut diharapkan kapasitas kelembagaan sekolah semakin kuat, kualitas perencanaan berbasis data meningkat, kolaborasi antarpemangku kepentingan semakin intensif, budaya mutu berkembang secara berkelanjutan, serta tercipta sistem tata kelola sekolah yang mampu menjaga keberlangsungan program peningkatan mutu pendidikan secara konsisten.

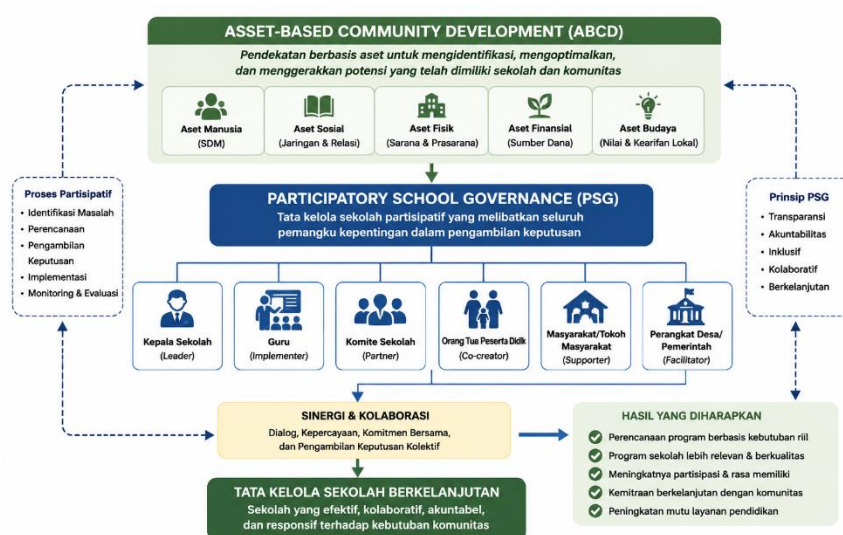
Metode Implementasi

Program pengabdian dilaksanakan di sekolah mitra dengan melibatkan **25 peserta** yang mewakili unsur-unsur strategis dalam tata kelola sekolah, terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, komite sekolah, perwakilan orang tua peserta didik, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut dimaksudkan untuk membangun proses pengambilan keputusan yang inklusif

sekaligus memperkuat kolaborasi dalam penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan.

Pendekatan yang digunakan adalah **Asset-Based Community Development (ABCD)** yang berorientasi pada pengembangan aset, potensi, dan sumber daya yang telah dimiliki sekolah beserta komunitasnya. Pendekatan ini dipadukan dengan model **Participatory School Governance (PSG)** sehingga seluruh pemangku kepentingan terlibat secara aktif sejak identifikasi kebutuhan, penyusunan solusi, implementasi program, hingga monitoring dan evaluasi. Integrasi kedua pendekatan tersebut memungkinkan proses pendampingan tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan dan keberlanjutan tata kelola sekolah.

Gambar 1 memperlihatkan kerangka pendekatan pengabdian yang mengintegrasikan prinsip ABCD dengan Participatory School Governance.



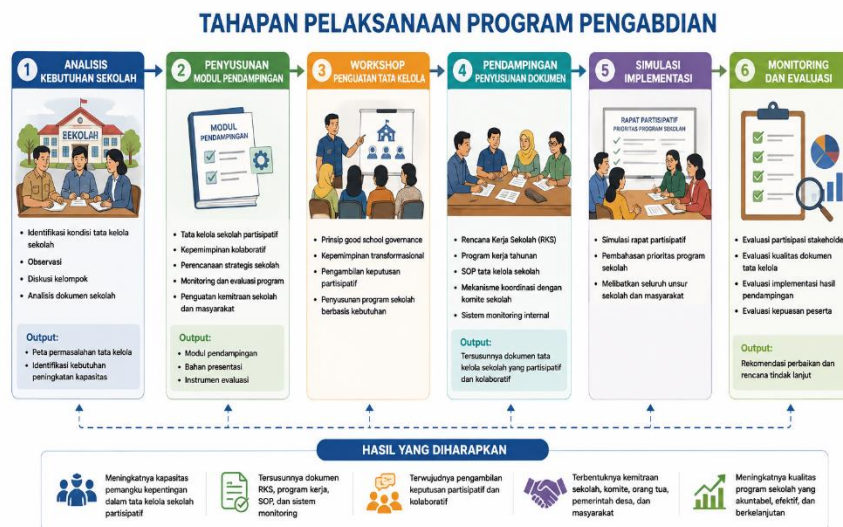
Gambar 1. Kerangka Pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) dan Participatory School Governance (PSG)

Gambar 1. Kerangka Pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) dan Participatory School Governance (PSG)

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui enam tahapan yang saling berkesinambungan sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 2**. Tahap pertama berupa **analisis kebutuhan sekolah** melalui observasi, diskusi kelompok (*Focus Group Discussion*), wawancara, serta telaah dokumen tata kelola sekolah untuk memperoleh peta permasalahan dan kebutuhan peningkatan kapasitas. Tahap kedua adalah **penyusunan modul pendampingan** yang mencakup materi mengenai tata kelola sekolah partisipatif, kepemimpinan kolaboratif, perencanaan strategis, monitoring dan evaluasi program, serta penguatan kemitraan sekolah dengan masyarakat.

Tahap ketiga dilaksanakan melalui **workshop penguatan tata kelola sekolah**, yang membahas prinsip *good school governance*, kepemimpinan transformasional, pengambilan keputusan partisipatif, dan penyusunan program sekolah berbasis kebutuhan. Selanjutnya pada tahap keempat dilakukan **pendampingan penyusunan dokumen tata kelola**, meliputi penyusunan atau penyempurnaan Rencana Kerja Sekolah (RKS), program kerja tahunan, standar operasional prosedur (SOP) tata kelola sekolah, mekanisme koordinasi dengan komite sekolah, serta sistem monitoring internal. Tahap kelima berupa **simulasi implementasi**, yaitu pelaksanaan rapat partisipatif yang melibatkan seluruh unsur sekolah dan masyarakat untuk menentukan prioritas program

sekolah sekaligus menguji mekanisme pengambilan keputusan secara kolaboratif. Tahap terakhir adalah **monitoring dan evaluasi**, yang dilakukan untuk menilai tingkat partisipasi pemangku kepentingan, kualitas dokumen tata kelola yang dihasilkan, implementasi hasil pendampingan, serta tingkat kepuasan peserta terhadap keseluruhan program.



Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan Program Pengabdian

Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan Program Pengabdian

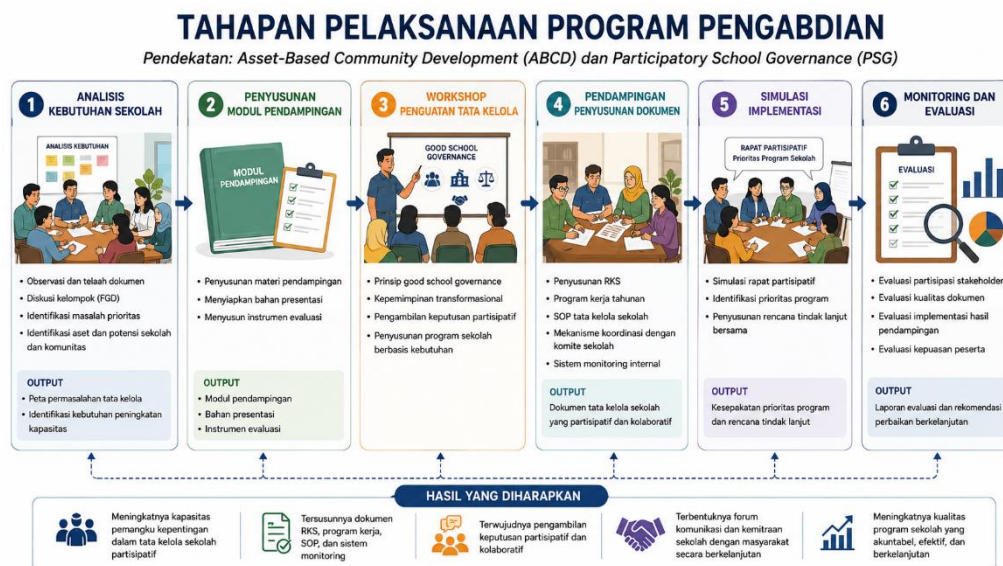
Data pengabdian dikumpulkan menggunakan beberapa instrumen, yaitu lembar observasi implementasi tata kelola sekolah, rubrik penilaian dokumen RKS dan SOP, angket kepuasan peserta, pedoman wawancara bagi kepala sekolah dan komite sekolah, lembar evaluasi partisipasi peserta, dokumentasi kegiatan, serta notulen *Focus Group Discussion* (FGD). Kombinasi instrumen tersebut digunakan untuk memperoleh data secara komprehensif mengenai proses maupun hasil pelaksanaan pendampingan.

Keberhasilan program ditentukan berdasarkan beberapa indikator, yaitu sedikitnya **80% peserta** mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, **75% peserta** menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai prinsip tata kelola sekolah partisipatif, tersusunnya dokumen RKS yang diperbarui secara partisipatif, tersusunnya SOP tata kelola sekolah berbasis kolaborasi, terbentuknya forum komunikasi rutin antara sekolah, komite sekolah, dan masyarakat, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan program sekolah.

Diskusi dan Hasil

3.1 Pelaksanaan Program Pendampingan Manajemen Pendidikan

Program pengabdian dilaksanakan melalui enam tahapan yang dirancang secara sistematis menggunakan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) yang dipadukan dengan model *Participatory School Governance* (PSG). Kegiatan melibatkan 25 peserta yang terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, komite sekolah, perwakilan orang tua, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Pendekatan tersebut menempatkan seluruh pemangku kepentingan sebagai subjek utama dalam proses identifikasi kebutuhan, penyusunan solusi, implementasi, hingga evaluasi program sehingga menghasilkan proses pendampingan yang partisipatif dan berorientasi pada penguatan tata kelola sekolah secara berkelanjutan.



Gambar 3. Tahapan pelaksanaan program pengabdian

3.2 Hasil Analisis Kebutuhan Tata Kelola Sekolah

Tahap awal difokuskan pada identifikasi kondisi eksisting tata kelola sekolah melalui observasi, telaah dokumen, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Hasil identifikasi menunjukkan bahwa kebutuhan utama sekolah berada pada tiga aspek, yaitu penguatan tata kelola partisipatif, peningkatan kapasitas manajerial, dan pengembangan kemitraan sekolah dengan masyarakat. Analisis juga menunjukkan bahwa proses penyusunan program sekolah masih didominasi oleh manajemen internal sehingga partisipasi komite sekolah, orang tua, dan masyarakat belum berlangsung secara optimal.

Tabel 1. Hasil Analisis Kebutuhan Mitra

Aspek	Temuan
Tata kelola	Mekanisme partisipatif belum berjalan sistematis
Kapasitas manajerial	Perencanaan strategis dan pengelolaan berbasis data perlu diperkuat
Kemitraan	Forum kolaborasi sekolah-komunitas belum terbentuk secara permanen

Temuan tersebut mengonfirmasi bahwa kebutuhan utama sekolah bukan hanya penyempurnaan dokumen administrasi, tetapi transformasi tata kelola menuju sistem yang lebih kolaboratif dan akuntabel.

3.3 Penguatan Kapasitas melalui Workshop Tata Kelola Sekolah

Workshop dilaksanakan secara interaktif dengan materi meliputi prinsip *Good School Governance*, kepemimpinan kolaboratif, perencanaan strategis berbasis data, pengambilan keputusan partisipatif, serta penguatan kemitraan sekolah dengan masyarakat. Seluruh materi disampaikan melalui kombinasi ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi sehingga peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual tetapi juga pengalaman praktik dalam menyusun solusi terhadap permasalahan sekolah.

Pembelajaran partisipatif tersebut mendorong peserta untuk memahami bahwa tata kelola sekolah merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya kepala sekolah atau guru.

3.4 Pendampingan Penyusunan Dokumen Tata Kelola

Tahapan berikutnya berupa pendampingan penyusunan dokumen tata kelola sekolah yang dilakukan secara kolaboratif. Peserta dibagi ke dalam kelompok kerja sesuai bidang masing-masing untuk menyusun dan merevisi dokumen strategis sekolah.

Dokumen yang dihasilkan meliputi:

- Rencana Kerja Sekolah (RKS);
- Program Kerja Tahunan;
- SOP Tata Kelola Sekolah;
- Mekanisme koordinasi sekolah–komite;
- Sistem monitoring internal.

Tabel 2. Luaran Pendampingan Dokumen

Dokumen	Kondisi Awal	Hasil Pendampingan
RKS	Belum partisipatif	Direvisi bersama stakeholder
Program Tahunan	Internal sekolah	Disusun kolaboratif
SOP Tata Kelola	Belum tersedia	Tersusun
Sistem Monitoring	Belum baku	Dirancang

Pendampingan memungkinkan setiap dokumen disusun berdasarkan kebutuhan riil sekolah serta mempertimbangkan aspirasi berbagai pemangku kepentingan.

3.5 Simulasi Participatory School Governance

Sebagai bagian dari implementasi, dilakukan simulasi rapat pengambilan keputusan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur sekolah dan masyarakat. Simulasi ini menggambarkan proses penyusunan prioritas program sekolah melalui mekanisme musyawarah, identifikasi kebutuhan, penetapan skala prioritas, serta penyusunan rencana tindak lanjut secara bersama.



Gambar 4. Simulasi pengambilan keputusan partisipatif.

Melalui simulasi tersebut peserta memperoleh pengalaman praktis mengenai mekanisme tata kelola sekolah yang lebih transparan, inklusif, dan akuntabel.

3.6 Monitoring dan Evaluasi Program

Monitoring dilakukan selama proses pendampingan, sedangkan evaluasi dilaksanakan pada akhir kegiatan untuk menilai keterlaksanaan program dan kualitas luaran.

Aspek evaluasi meliputi:

- tingkat partisipasi peserta;
- kualitas dokumen tata kelola;
- implementasi hasil pendampingan;
- kepuasan peserta;
- rencana keberlanjutan program.

Tabel 3. Indikator Evaluasi Program

No.	Aspek Evaluasi	Indikator	Instrumen	Kriteria Keberhasilan
1	Partisipasi peserta	Kehadiran peserta selama seluruh rangkaian kegiatan	Daftar hadir	≥ 80% peserta mengikuti seluruh kegiatan
2	Peningkatan pemahaman	Pemahaman peserta terhadap prinsip <i>Participatory School Governance</i> , tata kelola partisipatif, dan kepemimpinan kolaboratif	Pretest–posttest	≥ 75% peserta mengalami peningkatan pemahaman
3	Kualitas dokumen tata kelola	Tersusunnya Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang diperbarui secara partisipatif	Rubrik penilaian dokumen	Dokumen memenuhi komponen perencanaan partisipatif
4	Penyusunan SOP	Tersusunnya SOP tata kelola sekolah berbasis kolaborasi	Rubrik penilaian dokumen	SOP disahkan dan siap diimplementasikan
5	Penguatan kemitraan	Terbentuknya forum komunikasi antara sekolah, komite sekolah, orang tua, pemerintah desa, dan masyarakat	Berita acara/Notulen FGD	Forum komunikasi terbentuk dan memiliki agenda kerja
6	Implementasi hasil pendampingan	Penerapan mekanisme pengambilan keputusan secara partisipatif	Lembar observasi	Sekolah mulai menerapkan mekanisme kolaboratif dalam penyusunan program

7	Kepuasan peserta	Tingkat kepuasan terhadap materi, fasilitator, metode, dan manfaat program	Angket kepuasan	$\geq 80\%$ peserta memberikan penilaian baik atau sangat baik
8	Keberlanjutan program	Komitmen sekolah untuk melanjutkan implementasi tata kelola partisipatif	Wawancara kepala sekolah dan komite	Tersusun rencana tindak lanjut (<i>follow-up plan</i>) pascapendampingan

Pembahasan

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa pendekatan **Asset-Based Community Development (ABCD)** yang dipadukan dengan **Participatory School Governance (PSG)** mampu menggeser paradigma pengelolaan sekolah dari yang semula berorientasi administratif menuju tata kelola yang lebih kolaboratif. Pendekatan ABCD mendorong sekolah mengenali dan mengoptimalkan aset internal maupun eksternal sebagai modal utama pengembangan, sedangkan PSG memberikan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pengelolaan sekolah.

Keterlibatan kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat selama proses pendampingan memperkuat koordinasi, membangun rasa memiliki (*sense of ownership*), serta meningkatkan komitmen bersama terhadap pelaksanaan program sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola tidak cukup dilakukan melalui pelatihan administratif, tetapi memerlukan proses pendampingan yang berkesinambungan agar terjadi perubahan praktik organisasi.

Luaran berupa penyusunan RKS partisipatif, SOP tata kelola, mekanisme koordinasi, dan sistem monitoring internal menunjukkan bahwa proses pendampingan menghasilkan perubahan tidak hanya pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada sistem pengelolaan sekolah. Temuan ini memperlihatkan bahwa tata kelola partisipatif dapat menjadi fondasi bagi peningkatan mutu layanan pendidikan melalui pengambilan keputusan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan nyata sekolah.

Selain itu, terbentuknya forum komunikasi antara sekolah, komite, orang tua, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi indikator awal berkembangnya kemitraan yang lebih sistematis. Kemitraan tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan program sekolah karena mengurangi ketergantungan pada inisiatif individu dan memperluas dukungan sumber daya, baik dalam bentuk gagasan, pendampingan, maupun partisipasi masyarakat.

Secara keseluruhan, implementasi model **Participatory School Governance** menunjukkan potensi sebagai model pendampingan manajemen pendidikan yang efektif untuk memperkuat kapasitas kelembagaan sekolah. Integrasi antara penguatan kapasitas, penyusunan dokumen tata kelola, simulasi pengambilan keputusan, dan evaluasi partisipatif membentuk suatu mekanisme pengelolaan yang lebih adaptif dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Model ini tidak hanya menghasilkan perubahan pada aspek administrasi, tetapi juga membangun budaya kolaborasi yang menjadi prasyarat terwujudnya sekolah yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Program pengabdian melalui pendampingan manajemen pendidikan berbasis **Participatory School Governance (PSG)** yang dipadukan dengan pendekatan **Asset-Based Community Development (ABCD)** berhasil memperkuat kapasitas tata kelola sekolah melalui pelibatan aktif kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua, pemerintah desa, dan masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan program. Pendampingan tidak hanya menghasilkan peningkatan pemahaman mengenai prinsip tata kelola sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, tetapi juga menghasilkan luaran berupa penyempurnaan dokumen Rencana Kerja Sekolah (RKS), penyusunan SOP tata kelola sekolah berbasis kolaborasi, pengembangan mekanisme monitoring internal, serta terbentuknya forum komunikasi antara sekolah dan pemangku kepentingan. Implementasi model PSG mendorong perubahan paradigma pengelolaan sekolah dari yang semula berorientasi administratif menjadi lebih kolaboratif, adaptif, dan berbasis kebutuhan nyata sekolah. Dengan demikian, model pendampingan yang diterapkan berpotensi menjadi alternatif praktik baik (*best practice*) dalam penguatan tata kelola sekolah berbasis partisipasi komunitas untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan dan keberlanjutan program sekolah. Untuk menjamin keberlanjutan dampak, diperlukan komitmen sekolah dalam mengimplementasikan tata kelola partisipatif secara konsisten serta memperluas kemitraan dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat melalui evaluasi dan pendampingan berkelanjutan.

Referensi

- Agustina, D. W. (2023). Faktor Keberhasilan dan Tantangan pada Program Dosen Sukarelawan Sebagai Guru di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 3, 41–48. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v3iSE.2913>
- Ahmad Sultra Rustam, & Erni Qomariyah. (2024). KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DARI MASA KE MASA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF DYNAMIC GOVERNANCE. *Journal Publicuho*, 7(2), 643–654. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.426>
- Arap, E., Tremblay, P., & Larivée, S. J. (2024). Le plan d'intervention influence-t-il l'implication des parents auprès des élèves en difficulté ? Étude comparative selon les perspectives des parents. *McGill Journal of Education*, 57(3), 32–56. <https://doi.org/10.7202/1108996ar>
- Aruna, A., Surya, E. P., Prasetyo, A. R., Marcelliantika, A., & Wijaya, G. A. (2024). Integrasi Text-to-Image dan Generative Pre-Trained Transformer dalam Pengembangan Wisata Edukasi Ramah Anak Usia Dini. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 4(3). <https://doi.org/10.47467/visa.v4i3.3940>
- Azani, F. C., Muhafidin, D., & Utami, S. B. (2024). Strategi Kolaboratif Multisektor dalam Mengatasi Perundungan Anak: Studi Kasus Kota Bogor. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 40–64. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v10i1.34012>
- B, I. (2024). Peran Komite Sekolah terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar. *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 1(2), 118–132. <https://doi.org/10.62335/sfpe3g17>
- Bowen, F., Morissette, É., Levasseur, C., Marion, É., Carpentier, G., Poirer, E., Beaumont, C., Leadbeater, B., Beaulieu, J., Ouellet-Morin, I., St-Cyr, C., Cantin, S., & Fullan, M. (2022). Vers un partenariat pour la création de milieux scolaires favorisant, durablement et de façon efficiente, la socialisation et le bien-être psychologique

- des élèves et du personnel. *Canadian Journal of Community Mental Health*, 1–17. <https://doi.org/10.7870/cjcmh-2022-025>
- Christiani, L. C., Bhakti, I. S. G., & Winanta, R. A. (2022). Strategi Pengelolaan Wisata Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. *Jurnal Pemberdayaan Pariwisata*, 4(2), 76. <https://doi.org/10.30647/jpp.v4i2.1642>
- Efendi, S., Hamdi, S., Saputra, F., Iqbal, M., SH, H., Safitri, A., Zulhendra, D., Kasih, D., & Ramli. (2023). Program Desa Binaan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh di Gampong Pasi Mesjid Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. *GOTAVA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 26–33. <https://doi.org/10.59891/jpmgotava.v1i2.6>
- Ferianti, Setiawati, & Ilfiandra. (2023). Implementasi Kompetensi Sosial Guru BK melalui Pelaksanaan Student's Social and Emotional Learning untuk Membangun Budaya Damai di Sekolah. *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 8(01), 56–66. <https://doi.org/10.31316/gcouns.v8i01.4652>
- Gauvin, R., & Blouin, L. (2022). Témoignage d'un directeur d'école : Adopter une culture d'innovation pour faire l'Éducation autrement. *Revue Hybride de l'éducation*, 5(2), 155–169. <https://doi.org/10.1522/rhe.v5i2.1274>
- Handoyo, K., Mudhofir, M., & Maslamah, M. (2021). Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Madrasah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 321. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1855>
- Hasanah, E. (2021). BEST PRACTICE PENJAMINAN MUTU LULUSAN BERBASIS IASP 2020 DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 4(2), 178. <https://doi.org/10.17977/um027v4i12021p178>
- Iskandar, R., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). ANALISIS DESAIN MANAGEMEN SCIENTIFIC LEARNING PROGRAMS DI SEKOLAH DASAR. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 7(2). <https://doi.org/10.31949/jcp.v7i2.3073>
- Kartika, K., Prasetia, I., & Sulasmi, E. (2023). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah: Analisis Keterlibatan Stakeholders di Perguruan Ahmad Yani Binjai. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah Dan Tinggi [JMP-DMT]*, 4(3). <https://doi.org/10.30596/jmp-dmt.v4i3.15432>
- Komara, E., Apip, M., Sukamto, & Marup. (2023). Aktualisasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Berbasis Pendidikan Islam dalam Peningkatan Kualitas Mutu Sekolah. *Adabuna : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 3(1), 46–59. <https://doi.org/10.38073/adabuna.v3i1.1261>
- l'enfance, F. des N. U. pour, & Mondiale, L. B. (2021). Et ensuite ? Leçons sur la reprise de l'éducation. Éditions OCDE. <https://doi.org/10.1787/34bdb2cc-fr>
- Labelle, J., & St-Germain, M. (2021). Décentralisation et rapports de force. *Éducation et Francophonie*, 29(2), 198–222. <https://doi.org/10.7202/1079557ar>
- Lestariningsy, L. (2024). Manajemen Berbasis Sekolah Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Peran Komite Serta Tantangan Pelaksanaannya. *Jurnal Inovasi Pembelajaran Di Sekolah*, 5(1), 077–086. <https://doi.org/10.51874/jips.v5i1.225>
- M, A. H., Chatra, E., & Arif, E. (2024). Praktik Komunikasi Pada Advokasi Kebijakan Nasional Pendidikan Di Daerah (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kota Batam). *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 8(1), 325. <https://doi.org/10.31604/jim.v8i1.2024.325-330>
- Mahyudin, E., & Lestari, A. S. (2021). IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN SEKOLAH (STUDI KEBIJAKAN DI SEKOLAH DASAR DUA MEI CIPUTAT). *Managere: Indonesian Journal of Educational Management*, 3(1), 36–51. <https://doi.org/10.52627/managere.v3i1.95>
- Missouri, R., Alamin, Z., Sutriawan, S., Annafi, N., & Lukman, L. (2022). Kolaborasi Bersama Menuju Pendidikan Berkualitas: Pengalaman Penerapan Service Learning di Sekolah Menengah Atas. *Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 60–70. <https://doi.org/10.52266/taroa.v1i1.969>

- Natika, L. (2024). TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI ERA DIGITAL: MENUJU PELAYANAN MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK. *The World of Public Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v6i1.2040>
- Nurhayati, N., & Rahman, A. (2023). SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM SEKTOR PUBLIK. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 11(1), 1–22. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v11i1.9207>
- Pujiyono, B. (2022). KOLABORASI MULTI AKTOR DALAM PENGELOLAAN WISATA GEO PARK BELITUNG. *REFORMASI*, 12(1), 95–104. <https://doi.org/10.33366/rfr.v12i1.3367>
- Purnamasari, I., Choiru, U. D., Listyaningrum, R. A., Surya, E. P., Marcelliantika, A., & Aruna, A. (2024). Akselerasi Teknologi Asisten Guru melalui Pengembangan Virtual Teacher Hologram Berbasis Rapid Rural Appraisal dan MDA Framework. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 4(3). <https://doi.org/10.47467/visa.v4i3.3939>
- Rahman, H., Yusuf, F., Pagarra, H., Irfan, M., Faisal, M., & Bahar, B. (2024). DIKLAT Implementasi Kurikulum Merdeka; Pembelajaran Berdiferensiasi di Sekolah Dasar Negeri 3 Mimika. *Jurnal Panrita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(02), 31–39. <https://doi.org/10.47435/jcs.v2i02.2789>
- Rahmat, R., & Wahyudin, D. (2021). Penguatan Peran Kepemimpinan Kurikulum (Curriculum Leadership) Wakil Kepala Sekolah dalam Mengimplementasikan Kepemimpinan Pembelajaran (Instructional Leadership). *Inovasi Kurikulum*, 18(1), 10–17. <https://doi.org/10.17509/jik.v18i1.36013>
- Rasidi, R., Lestari, E. S., Amalia, R. A., Yulindari, M. R., Balqis, F. A. A., & Pangesti, N. D. (2022). Collaborative Management Practice menuju Sekolah Berkualitas di Bustanul Athfal Aisyiyah Pujotomo. *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Bagi Masyarakat)*, 11(2), 117. <https://doi.org/10.20961/semar.v11i2.57295>
- Rochaendi, E., Aminudin, A., Kiyamudin, E., & Wahyudi, A. (2022). PENGARUH KEPEMIMPINAN STRATEGIK DAN MANAJEMEN PEMBIAYAAN TERHADAP MUTU PENDIDIKAN. *JAMP : Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 5(1), 53–63. <https://doi.org/10.17977/um027v5i12022p53>
- Rohman, A. M., & Hamidah, K. (2024). Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pati. *Al-I'timad: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(2), 137–154. <https://doi.org/10.35878/alitimad.v2i2.1362>
- Sholeh, M. I. (2023). Strategi Efektif dalam Manajemen Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education*, 4(2), 139–164. <https://doi.org/10.55380/tarbawi.v4i2.462>
- Suryana, A. (2023). Partisipasi Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah. *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies*, 3(2), 337–349. <https://doi.org/10.47467/edui.v3i2.3639>
- Susilawathi, A. A. R., Muawanah, U., & Ahmad, A. (2021). Dampak penerapan GSG dimediasi reputasi sekolah terhadap kinerja SMK Swasta di Kota Malang. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(1), 69–83. <https://doi.org/10.21067/jem.v17i1.5297>
- Syahmidi, S., Jasmani, J., Rahmat, R., & Tumini, T. (2023). PENDAMPINGAN TATA KELOLA ADMINISTRASI SEKOLAH DI KOTA PALANGKA RAYA. *Jurnal Penamas Adi Buana*, 7(01), 22–35. <https://doi.org/10.36456/penamas.vol7.no01.a7205>
- Tujiyono, T. (2023). Peran Komite bagi Kemajuan Sekolah dalam Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah. *Jurnal Edukasi*, 1(1), 93–102. <https://doi.org/10.60132/edu.v1i1.111>
- Widyastuti, H., Arisma, A., Lestari, A., Nurvadila, F., Maharani, H., Yanti, M. Y., Aditiya, M., Alfianur, M., Sari, N., Anwar, W., & Puspita, W. H. (2024). Revitalisasi TPA Al-Muhajirin: Membangkitkan Semangat Belajar dan Partisipasi Komunitas dalam Pendidikan Agama di Takaras Kota. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada*

- Masyarakat (PKM), 7(4), 1454–1470. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i4.12903>
- Yanuardianto, E. (2021). Pola Pendekatan Manajemen Berbasis Madrasah (Mbm) Di Madrasah Ibtidaiyyah. *Auladuna : Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah*, 3(1), 71–84. <https://doi.org/10.36835/au.v3i1.506>
- Zerika, S., Moody, Z., & Darbellay, F. (2022). Les pédagogies « alternatives » au prisme de trois études de cas. *Recherches & Éducatons*. <https://doi.org/10.4000/rechercheseducations.12353>